



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. TRIKA PITANA
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
3. NHK : 798816

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.385.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 780.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2013, LAINNYA Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN DIESEL G MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE TYPE G MINI SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, LAINNYA Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 236.429.204

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 627.922.371



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.120.151.575
III. HUTANG	Rp.	41.359.484
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.078.792.091

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.